



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA DITJEN HUBLA TAHUN 2025



LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi publik setiap tahunnya yang nantinya akan dikirim ke Komisi Informasi Pusat.

Laporan layanan informasi publik dilakukan setiap tahun yang berisikan jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan informasi, serta alasan penolakan permintaan informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan informasi dan dokumentasi, PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.



TUJUAN

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik;
- Untuk memenuhi kewajiban administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
- Sebagai alat evaluasi kinerja layanan informasi publik;
- Sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- Sebagai sarana transparansi kepada pimpinan dan publik;
- Sebagai pendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.



GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA DITJEN HUBLA

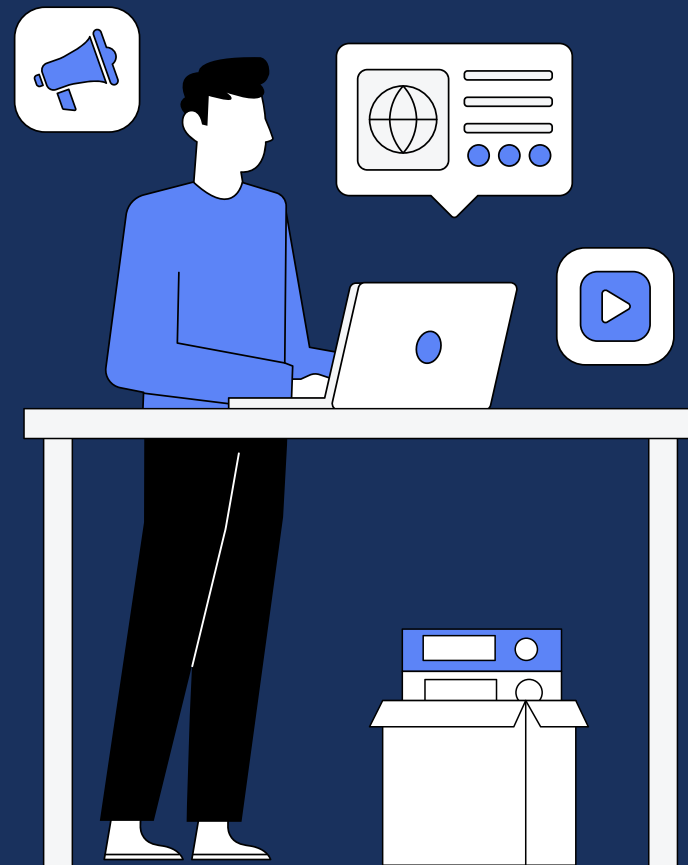
PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan layanan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PM Nomor 46 Tahun 2018. Berkoordinasi dengan PPID Utama Kementerian Perhubungan, layanan informasi diselenggarakan melalui berbagai kanal, baik secara daring maupun luring, guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan layanan informasi publik Ditjen Hubla berperan sebagai garda depan pelayanan informasi publik sektor transportasi laut serta mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Secara umum, layanan informasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar pelayanan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di tahun berikutnya.



Layanan dilakukan melalui:

- Website resmi PPID Kemenhub (ppid.dephub.go.id)
- Email (ppidkemenhub@gmail.com)
- Surat langsung
- Layanan tatap muka

Jenis informasi yang dilayani:

- Informasi berkala
- Informasi serta merta
- Informasi setiap saat
- Permohonan informasi khusus



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

CAPAIAAN UTAMA PPID PELAKSANA DITJEN HUBLA TAHUN 2025

Meraih kategori **INFORMATIF** dengan total nilai 97,7 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025.

PPID Pelaksana UPT

4 UPT Informatif

7 UPT Menuju Informatif

24 UPT Cukup Informatif

27 UPT Kurang Informatif

200 UPT Tidak Informatif

27 UPT Tidak Registrasi





PERMOHONAN INFORMASI

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima **93 permohonan informasi** yang terdiri dari 30 permohonan informasi secara *offline* dan 63 permohonan informasi secara *online*.

Sedangkan untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan informasi yakni sekitar 1-14 hari kerja.

KEBERATAN INFORMASI

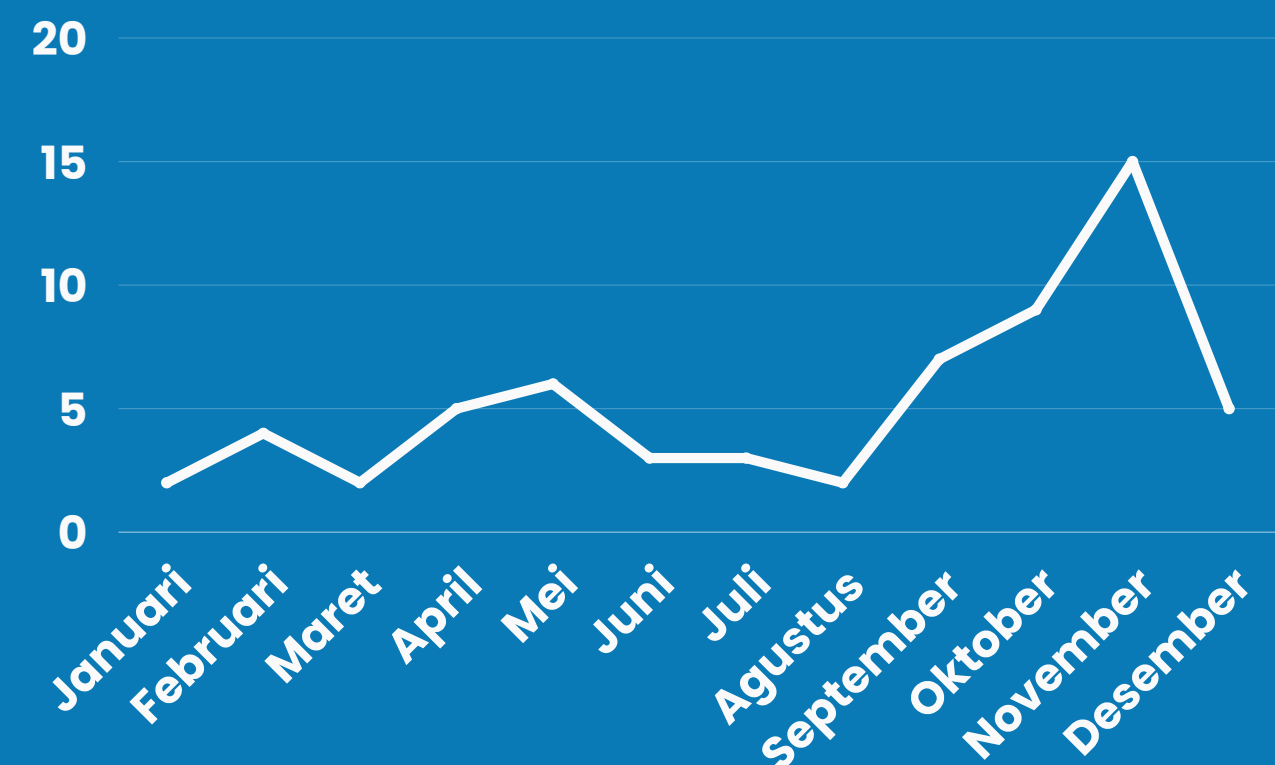
Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima **1 Keberatan Informasi**, namun sudah dijawab dan ditangani dengan baik.

*Data per 20 Januari 2025

Permohonan Informasi (Offline)



Permohonan Informasi (Online)



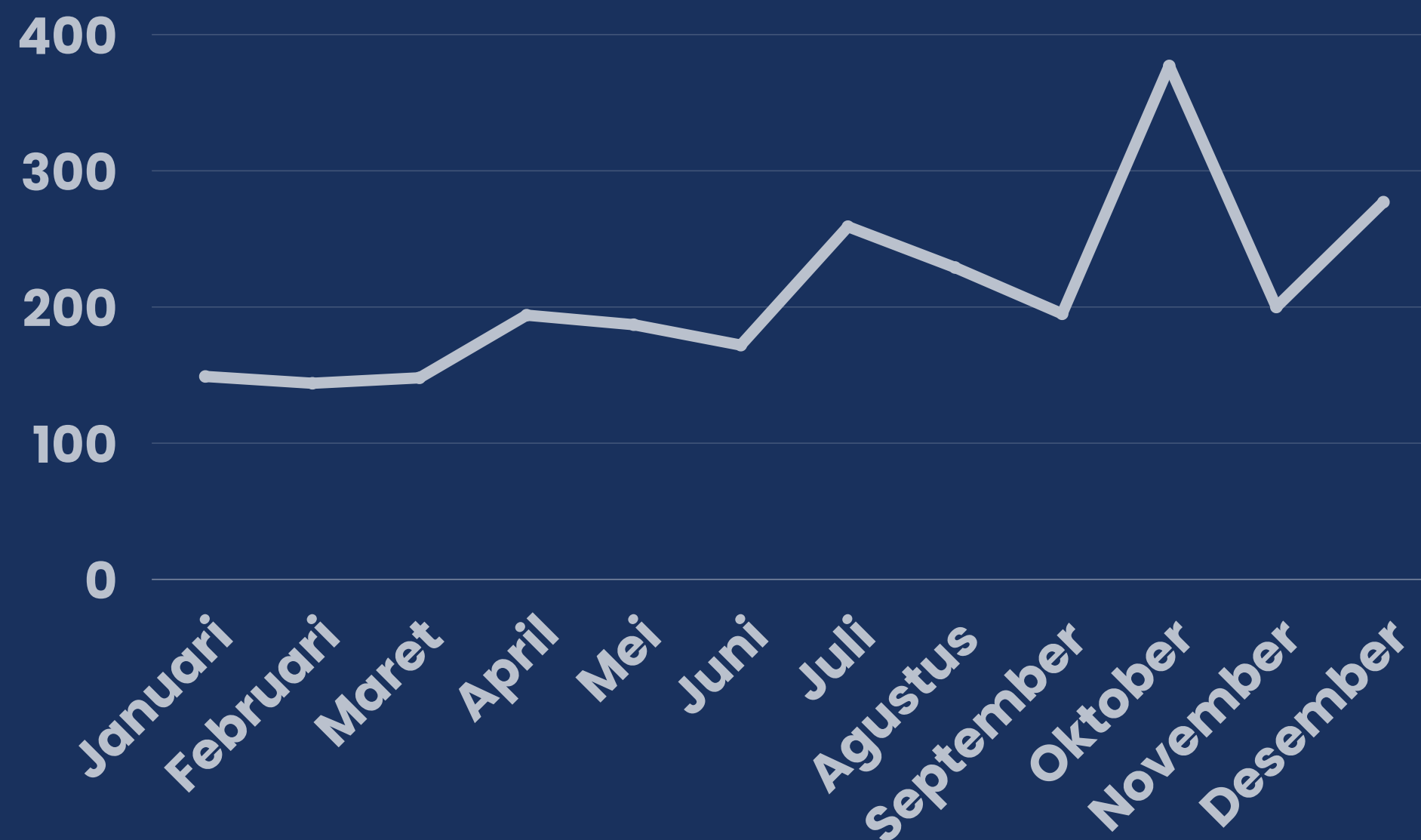


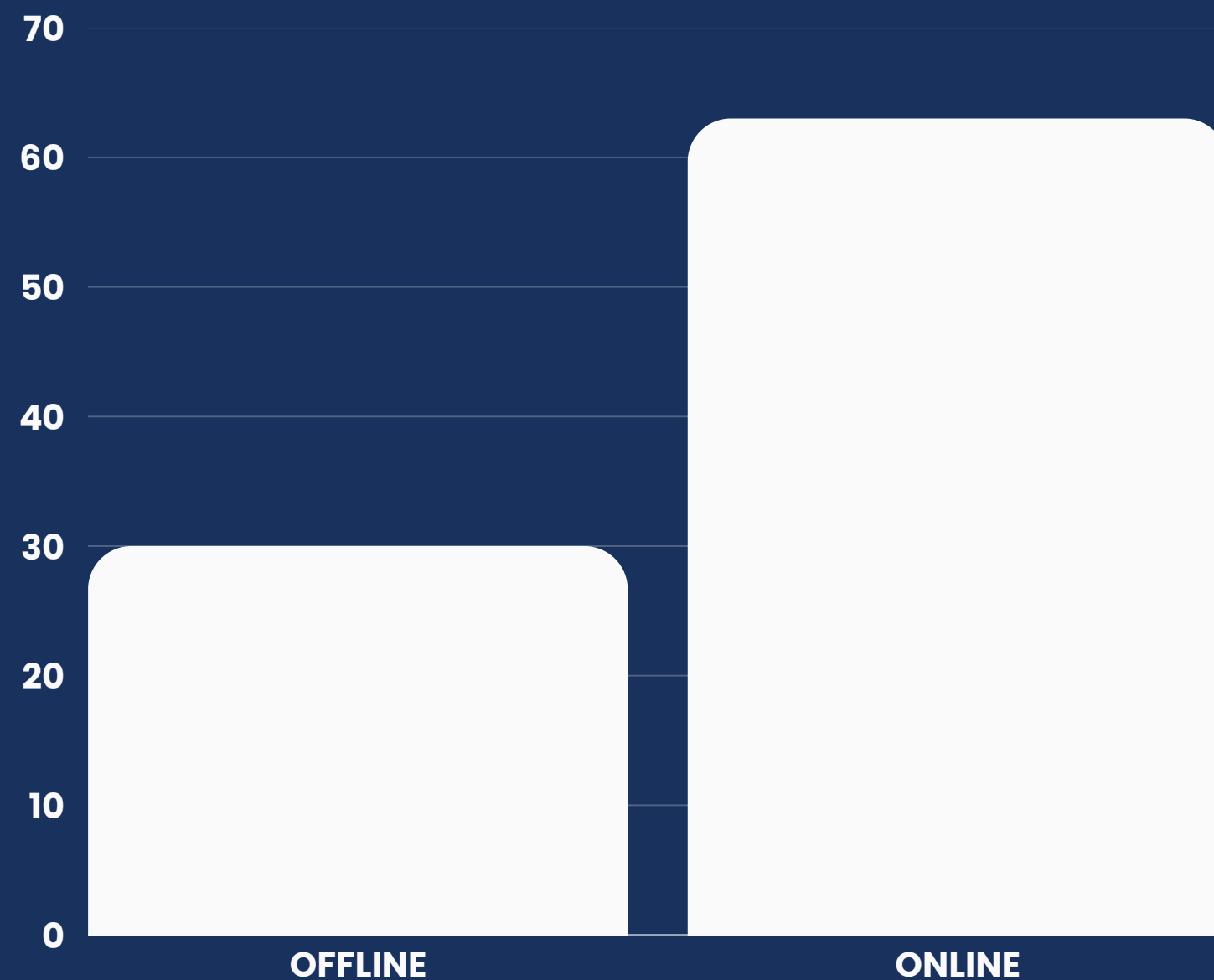
PERMOHONAN INFORMASI PPID PELAKSANA UPT

Selama tahun 2025, jumlah permohonan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Ditjen Hubla kurang lebih sebanyak **2.531 permohonan informasi***.

*Data per 20 Januari 2026

Permohonan Informasi PPID Pelaksana UPT





PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

1

DITERIMA

Terdapat **93 permohonan** informasi yang diterima melalui PPID Pelaksana Ditjen Hubla.

2

DITOLAK

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2025.



ISU STRATEGIS PELAYANAN INFORMASI

PENINGKATAN EKSPEKTASI PUBLIK
TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI



Masyarakat semakin menuntut layanan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, seiring meningkatnya kesadaran akan hak atas informasi publik.

KONSISTENSI KUALITAS INFORMASI
PUBLIK



Perlu keseragaman dan validitas data/informasi yang disampaikan oleh seluruh unit kerja agar tidak menimbulkan perbedaan informasi kepada publik.

KOORDINASI DAN KESIAPAN UNIT TEKNIS



Responsivitas unit teknis dalam menyediakan data masih menjadi faktor kunci keberhasilan layanan PPID Pelaksana.

POTENSI KEBERATAN DAN SENGKETA
INFORMASI



Permohonan informasi yang bersifat sensitif memerlukan kehati-hatian dalam uji konsekuensi untuk meminimalkan risiko keberatan dan sengketa informasi.





ISU STRATEGIS PELAYANAN INFORMASI

KETERBATASAN SDM DAN
BEBAN KERJA PPID



Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM PPID berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan informasi publik.

PEMANFAATAN SISTEM LAYANAN
INFORMASI DIGITAL



Optimalisasi sistem digital masih memerlukan penguatan integrasi, pemutakhiran data, dan kedisiplinan pengelolaan konten.

CITRA DAN REPUTASI INSTITUSI



Setiap layanan informasi publik berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat dan reputasi Ditjen Perhubungan Laut.



RENCANA KEGIATAN 2026



Pembahasan DIP DIK Ditjen Hubla Tahun 2026

Pemutakhiran data DIP dan DIK
Kementerian Perhubungan
berdasarkan UU KIP No 14 Tahun
2008



Workshop Keterbukaan Informasi Publik

Meningkatkan pengelolaan
layanan informasi publik



Monitoring PPID

Memastikan layanan informasi
publik berjalan sesuai dengan
ketentuan dan sebagai tindak
lanjut evaluasi hasil AKIP Tahun
2025



Penyusunan dan Penetapan SK PPID

Pembaharuan SK PPID sesuai
dengan nomenklatur yang baru

THANK YOU

For Your Attention



ppidhubla@gmail.com



hubla.dephub.go.id



Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum